

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER

KABUPATEN WONOGIRI 2022

<https://wonogirikab.bps.go.id>



ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER

KABUPATEN WONOGIRI
2022

<https://wonogirikab.bps.go.id>

**ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA
BERBASIS GENDER
KABUPATEN WONOGIRI
2022**

Nomor Publikasi : 33120.2346

Nomor Katalog : 2104028.3312

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 70 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Ilustrasi Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Sumber Ilustrasi : www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rahmad Iswanto, SST., M.Si

Penanggung Jawab:

Kurniawan Dwi Nugroho, SST

Editor:

Kurniawan Dwi Nugroho, SST

Penulis:

Aditya Etika Sari, SST

Penyusun Tabel:

Aditya Etika Sari, SST

Layout dan Infografis:

Aditya Etika Sari, SST

<https://wonogirikab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

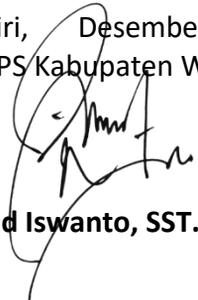


Publikasi Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Kabupaten Wonogiri 2022 terdiri berbagai data dan informasi terpilih seputar Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara, IDG mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Angka IPG dan IDG disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPG dan IDG secara periodik menurut wilayah memungkinkan setiap wilayah mengetahui peta pembangunan manusia berbasis gender didaerahnya, baik pencapaian, kecepatan, posisi maupun disparitas antardaerah. .

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri, serta bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Wonogiri pada masa mendatang.

Wonogiri, Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten Wonogiri



Rahmad Iswanto, SST., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel dan Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab 1	
Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan	4
3. Sistemika Penulisan	4
4. Sumber Data	5
Bab 2	
Metodologi	7
1. Konsep Pembangunan Gender	9
2. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender	10
3. Perubahan Interpretasi	13
4. Konsep Pemberdayaan Gender	14
Bab 3	
Gambaran Umum Gender di Kabupaten Wonogiri	17
1. Komposisi Penduduk	20
2. Kesehatan	23
3. Pendidikan	27
4. Tenaga Kerja	28
5. Kesempatan dalam Pemerintahan	28

DAFTAR ISI

Bab 4	Capaian Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri	31
	1. IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta.....	35
	2. Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri....	36
Bab 5	Capaian Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri	43
	1. IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta.....	45
	2. Perkembangan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri..	46
Bab 6	Kesimpulan	51
	Daftar Pustaka	55
	Lampiran	59

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG.....	12
Tabel 2.2	Dimensi dan Indikator Pembentukan IPG	15
Gambar 3.1	Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.....	21
Gambar 3.2	Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022	22
Gambar 3.3	Piramida Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022	23
Gambar 3.4	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022	24
Gambar 3.5	Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022	25
Gambar 3.6	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022	26
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijasah Tertinggi yang Dimilik di Kabupaten Wonogiri, 2022.....	27
Gambar 3.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2022	28
Gambar 3.9	Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2022	29
Gambar 3.10	Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022	30
Gambar 4.1	IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta, 2020 - 2022	35
Tabel 4.1	Komponen IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2022	36
Gambar 4.2	Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022.....	37
Gambar 4.3	Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022	39

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 4.4	Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022 .	40
Gambar 4.5	Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022..	41
Gambar 4.6	Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022.....	42
Gambar 5.1	IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2022	46
Gambar 5.2	IDG Kabupaten Wonogiri, 2018-2022.....	46
Gambar 5.3	Komponen IDG Kabupaten Wonogiri, 2018-2022.....	46
Gambar 5.4	Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022 2	46
Gambar 5.5	Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022	46
Gambar 5.6	Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022	61
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rangking IPG, 2021-2022	62
Lampiran 3	Usia Harapan Hidup Saat lahir (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022	63
Lampiran 4	Harapan Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022	64
Lampiran 5	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022	65
Lampiran 6	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022	66
Lampiran 7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Rangking IDG, 2021-2022	67
Lampiran 8	Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022	68
Lampiran 9	Keterlibatan Sebagai Tenaga Profesional menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022	69
Lampiran 10	Sumbangan Pendapatan menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022	70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai “warga kelas dua”.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 tercatat 91,73 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yang tercatat 91,07. Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebesar 72,97 meningkat dibanding IDG Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yang tercatat 71,55.

BAB

PENDAHULUAN

1

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

1.1 Latar Belakang

Dari beberapa literatur, konsep gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan (Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, isu-isu terkait gender cukup menarik perhatian terutama pada masalah diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi terjadi dari berbagai aspek kehidupan yaitu berupa perilaku masyarakat yang berasal dari suatu aturan, sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Diskriminasi gender akan melahirkan kesenjangan gender, yang akan menghilangkan hak-hak perempuan atas kesempatan dan kendali pada sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Sebagai pihak yang melahirkan dan mendidik generasi penerus, perempuan harus dilindungi hak-hak hidupnya. Bentuk perlindungan hak-hak tersebut adalah menerima perlakuan yang adil terhadap aspek-aspek dasar manusia, yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang melahirkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat mutlak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui Majelis Umum PBB telah mencetuskan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap permasalahan gender, dan diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang berkaitan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat ini juga sedang dibahas mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta merta masalah-masalah terkait gender akan hilang. Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan. Hal ini seiring dengan pendapat dari UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah

satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi. Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

1.2 Tujuan

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Publikasi ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). Disamping itu, disajikan pula analisis mengenai angka IPG pada level kabupaten.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari 6 bab, yaitu :

- Bab I : menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan sumber data.
- Bab II : menjelaskan mengenai metodologi penghitungan IPG
- Bab III : menjelaskan mengenai gambaran umum gender di Kabupaten Wonogiri
- Bab IV : menjelaskan mengenai capaian pembangunan gender di Kabupaten Wonogiri

- Bab V : menjelaskan mengenai capaian pemberdayaan gender di Kabupaten Wonogiri
- Bab VI : menjelaskan mengenai kesimpulan dari penulisan publikasi ini.

1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dipilah menurut laki-laki dan perempuan. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Sedangkan data Susenas digunakan untuk menghitung angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara data Sakernas digunakan untuk mendapatkan angka upah serta jumlah angkatan kerja sebagai penunjang penghitungan pendapatan per kapita yang disesuaikan.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB

METODOLOGI

2



DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER



Umur Panjang
dan Hidup Sehat



Pengetahuan



Standar Hidup Layak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antargender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

2.1 Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan. Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan,

pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable

Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

2.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Gender

Pada tahun 2014, Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari Susenas.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Maksimum		Minimum	
	Laki – laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usia Harapan Hidup (Tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18	18	0	0
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp)	26.572.352		1.007.436	

Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut:

$$Indeks X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$$

Dimana :
 $X_{(i,j)}$: indeks komposit komponen ke-i
 $X_{(i-min)}$: nilai minimum komponen
 $X_{(i-maks)}$: nilai maksimum komponen

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

$$X_{pendidikan} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki- laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata- rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_L = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ l} \times X_{pendidikan\ l} \times X_{pengeluaran\ l}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{X_{kesehatan\ p} \times X_{pendidikan\ p} \times X_{pengeluaran\ p}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometric ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata- rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi. Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki- laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

2.3 Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki- laki dan perempuan. Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM.

Saat ini, IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki- laki. Dengan demikian, IPG semakin ideal jika nilainya mendekati angka 100. Nilai IPG di bawah 100 berarti bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah laki-laki. Oleh karena IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki maka metode perhitungan IPG yang dilakukan

oleh BPS pun berbeda dengan GDI yang dilakukan oleh UNDP. Hal ini disebabkan cara menghitung IPM yang berbeda dengan HDI, sedangkan menghitung IPG didahului dengan menghitung IPM.

2.4 Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran well-being. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Pembentukan IPG

Dimensi	Indikator
(1)	(2)
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki – laki dan perempuan
Pengambilan Keputusan	Proporsi dan manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki – laki dan perempuan
Distribusi Pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki – laki dan perempuan

Sumber : BPS

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006).

Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai indeks ketidaksetaraan gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

Saat ini, penghitungan Gender Empowerment Measure (GEM) oleh UNDP sebagai pendekatan nilai IDG secara internasional sudah tidak dilakukan. Penghitungan GEM ini digantikan oleh Gender Inequality Index (GII).

BAB

3

GAMBARAN UMUM GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

Tahun 2022

KOMPOSISI PENDUDUK

Penduduk Menurut
Jenis Kelamin

 **527,65 ribu jiwa**

 **529,43 ribu jiwa**

KESEHATAN

Angka Kesakitan

 **10,21 persen**

 **13,69 persen**

TENAGA KERJA

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

 **85,85 persen**

 **64,68 persen**

PENDIDIKAN

Penduduk 15 tahun ke atas
Menurut Jenis Kelamin dan
Ijazah Tertinggi (persen)

		
D4/S1+	3,35	3,23
Profesi	0,07	0,07
Akademi/DIII	0,27	1,38
DI/DII	0,20	0,06
SMK/ sederajat	10,50	5,41
SMA/ sederajat	14,58	15,73
SMP/ sederajat	24,39	23,87
SD/ sederajat	36,26	32,76
Tidak punya ijazah	10,38	17,49

KESEMPATAN DALAM PEMERINTAH

PNS menurut Tingkat
Pendidikan dan Jenis
Kelamin

		
D4/S1+	2.714	3.165
DIII	263	976
DI/DII	68	28
SMA/ sederajat	780	265
SMP/ sederajat	71	1
Sampai dengan SD	8	0

Istilah gender sangat terkait dengan paradigma yang berlaku pada masyarakat, yaitu perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memiliki budaya patriarki, perbedaan tersebut cukup jelas terjadi di masyarakat. Pada praktiknya, perbedaan tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan melalui praktik-praktik nilai-nilai budaya, sosial dan nilai-nilai kehidupan lainnya tidak dapat dihindari.

Selama ini peran publik dan domestik menjadi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki cenderung berperan dalam aktivitas publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan pendapatan. Sedangkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat selama ini. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini tidak terlepas dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga. Sementara untuk mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki. Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Disamping itu budaya patriarki yang masih kuat berkembang pada masyarakat Indonesia, terkadang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua. Salah satunya adalah kurang diakuinya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingannya belum banyak terwakili. Hal ini juga berdampak pada ketidaksetaraan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

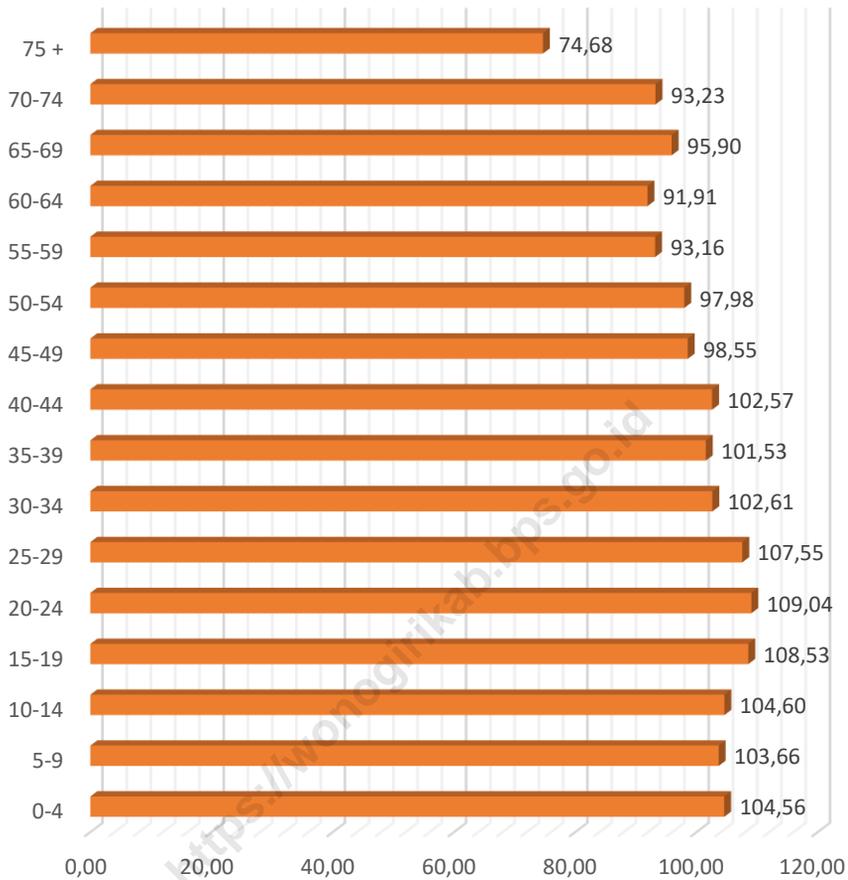
Pada perkembangannya, saat ini perempuan Indonesia sudah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Terlihat dari banyaknya perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Di samping itu banyak prestasi- prestasi yang diperoleh para perempuan Indonesia pada level nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki oleh perempuan

Indonesia, tidak kalah dengan laki-laki. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

3.1 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebanyak 527.651 jiwa, atau 49,92 persen dari penduduk Kabupaten Wonogiri. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebanyak 529.436 jiwa, atau 50,08 persen dari penduduk Kabupaten Wonogiri. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonogiri sebesar 99,66. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia 0 - 40 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Pada kelompok umur yang lebih tinggi, karena umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan, maka kecenderungannya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok umur 75 + rasio jenis kelamin sebesar 74,68 yang menunjukkan terdapat 74,68 laki – laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di kelompok umur 75+ memiliki proporsi yang paling besar dibandingkan kelompok lain.

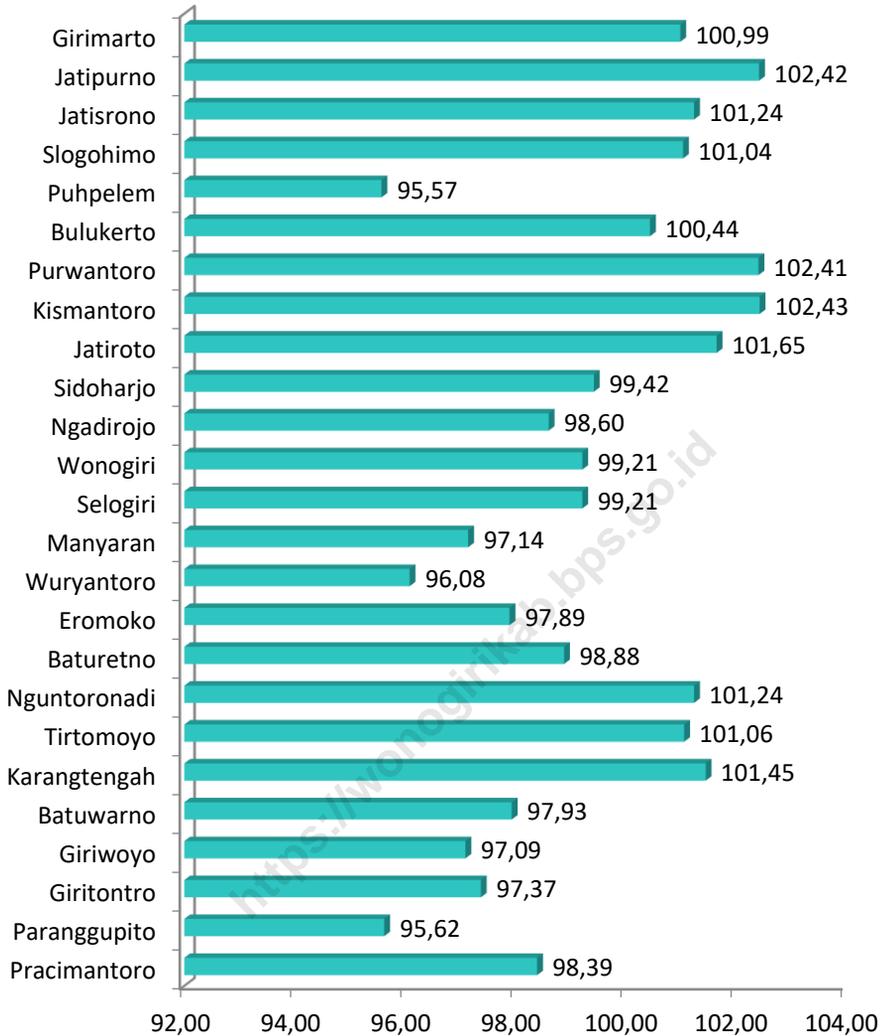
Gambar 3.1. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022



Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kecamatan. Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level kabupaten, yaitu penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki. Namun demikian, di beberapa kecamatan lain tercatat lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi dicatat oleh Kecamatan Kismantoro (102,43) dan terendah ditemukan di Kecamatan Puhpelem (95,57).

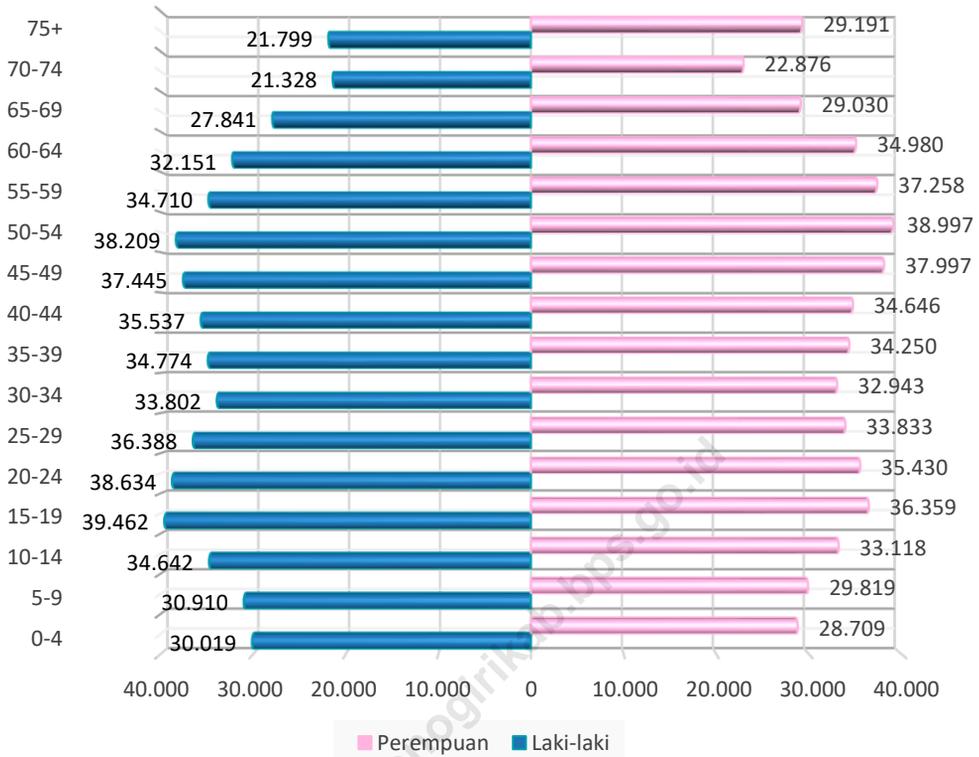
Gambar 3.2. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022



Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Tak kalah penting peran perempuan adalah dalam sisi produktivitas, yaitu sebagai penyumbang angkatan kerja. Dari komposisi penduduk, kelompok usia 50-64 tahun, di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah, namun sebaliknya, jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

Gambar 3.3. Piramida Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tahun 2022



Sumber : Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2023

3.2 Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses serta dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Pemerintah menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan Angka Kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, merata serta terjangkau, dengan memberikan

pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

3.3.1 Kualitas Kesehatan Masyarakat

Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitive terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Pada tahun 2020 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan paling banyak baik dari kelompok laki – laki maupun perempuan yaitu sebesar 24,40 persen dan 28,83 persen.

Gambar 3.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022

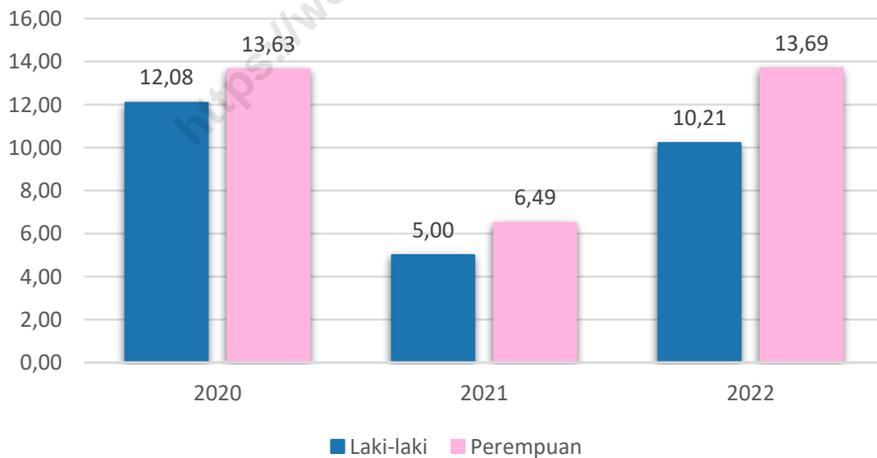


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2022

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan angka kesakitan penduduk perempuan di Kabupaten Wonogiri mencapai 13,69 persen, yang paling tinggi selama tahun 2020 - 2022. Angka kesakitan penduduk laki-laki Kabupaten Wonogiri lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya, demikian juga angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, diantaranya disebabkan perilaku dan gaya hidup manusia.

Gambar 3.5. Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2022

3.3.2 Akses Kesehatan Masyarakat

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut

dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari 23,25 persen penduduk laki – laki yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, ternyata 62,87 persen penduduk yang berobat jalan. Dari 28,31 persen penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir, ternyata 61,42 persen penduduk yang berobat jalan. Dalam kurun waktu 2021-2022, penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan memiliki kecenderungan melakukan berobat jalan lebih besar. Penduduk laki – laki dan perempuan pada tahun 2022 mempunyai keluhan kesehatan mengalami kenaikan persentase yang melakukan berobat jalan dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 3.6. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022

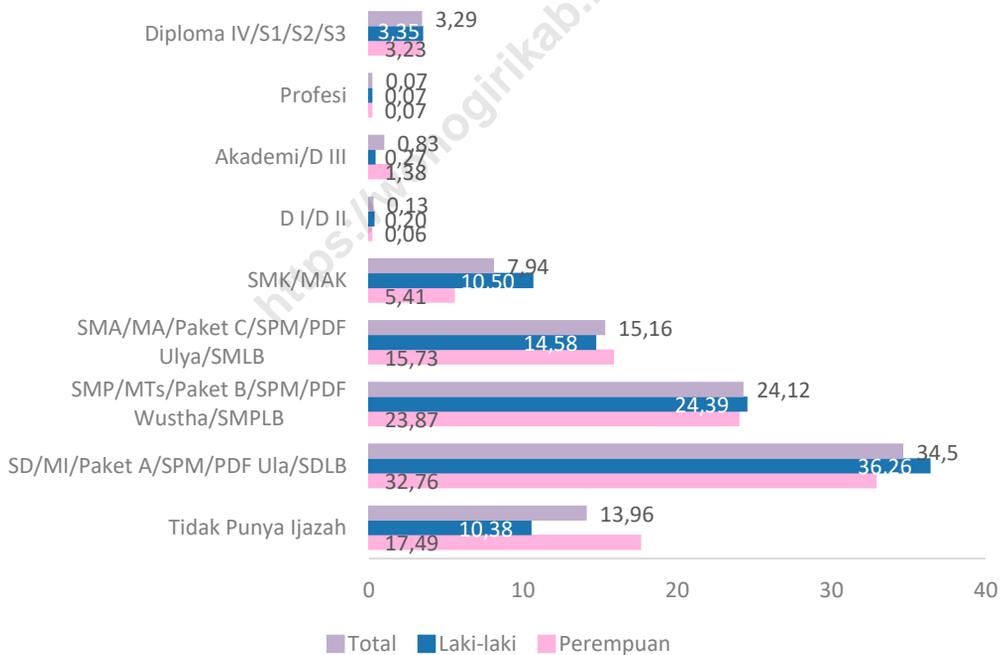


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2022

3.3 Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Kabupaten Wonogiri, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang (Gambar 3.7). Pada jenjang pendidikan D IV dan S1 ke atas, persentase laki - laki yang memperoleh ijazah melebihi persentase perempuan. Sedangkan persentase penduduk perempuan yang tidak punya ijazah lebih besar yaitu sebesar 17,49 persen dibandingkan persentase penduduk laki -laki sebesar 10,38 persen.

Gambar 3.7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Ijasah Tertinggi yang Dimilik di Kabupaten Wonogiri, 2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2022

Semakin berkurangnya kesenjangan pendidikan laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa budaya masyarakat Kabupaten Wonogiri yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding perempuan sudah mulai memudar. Namun, pada jenjang pendidikan sekolah menengah persentase perolehan ijazah laki-laki masih lebih besar

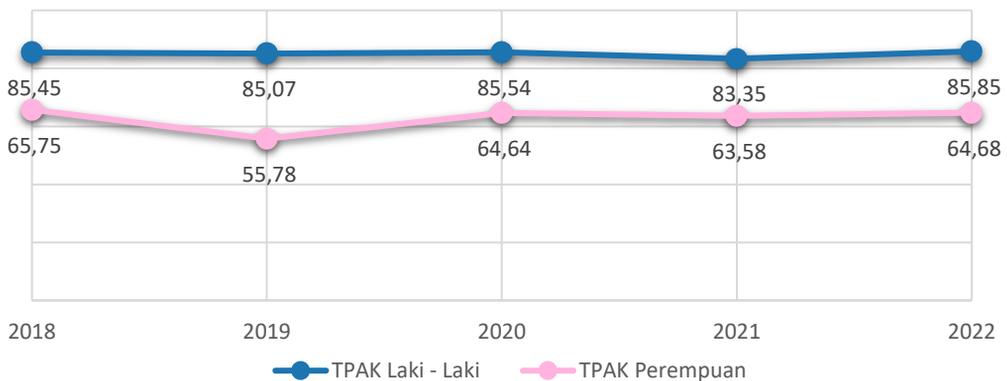
dibandingkan perempuan. Demikian pula dengan persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah, juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

3.4 Tenaga Kerja

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan perempuan. Namun disisi lain, banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Perbedaan kesempatan kerja tersebut berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2022 angka TPAK perempuan hanya sekitar 64,68 persen, sedangkan TPAK laki-laki sudah mencapai sekitar 85,85 persen. Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 TPAK perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami kenaikan, jika dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki mengalami kenaikan 2,50 poin, sedangkan TPAK perempuan hanya naik 1,10 poin.

Gambar 3.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022



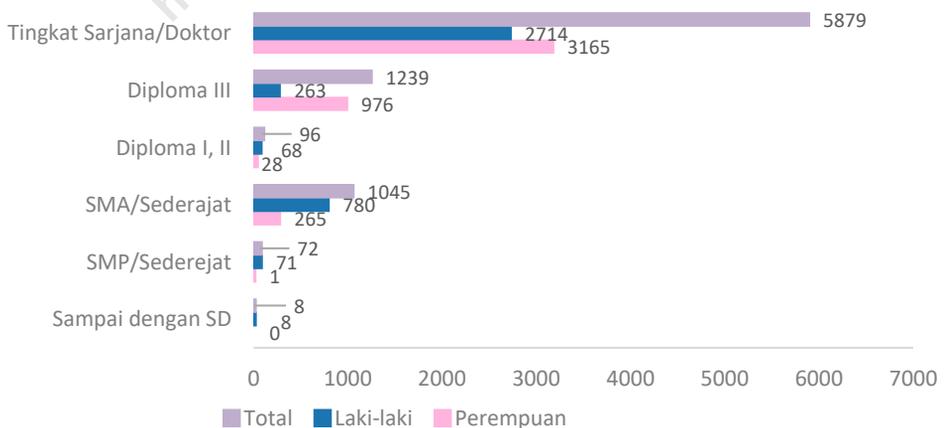
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

3.5 Kesempatan Dalam Pemerintahan

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perempuan harus mewakili aspirasinya pada lembaga legislatif. Dengan duduk

pada lembaga legislatif, maka kepentingan perempuan akan mampu diperjuangkan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menjadi salah satu indikator kesetaraan gender dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen, sepertinya belum memenuhi. Bahkan pada tahun 2022, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Wonogiri baru mencapai 16 persen. Data Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri, dari 50 orang anggota DPRD, jumlah anggota DPRD perempuan hanya 8 orang. Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam pemerintahan di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin tinggi. Jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN Laki-laki. Jika dilihat menurut pendidikannya, ASN perempuan lebih unggul dibanding ASN laki-laki (Gambar 3.8). Hal ini terlihat dari jumlah ASN perempuan dengan tingkat pendidikan Diploma III ke atas lebih banyak dibandingkan ASN Laki-laki. Banyaknya jumlah ASN perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, membuktikan kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki semakin tinggi pada sektor Pemerintahan. Keinginan untuk disamakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tapi juga sebagai bentuk capaian emansipasi perempuan saat ini.

Gambar 3.9. Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2022

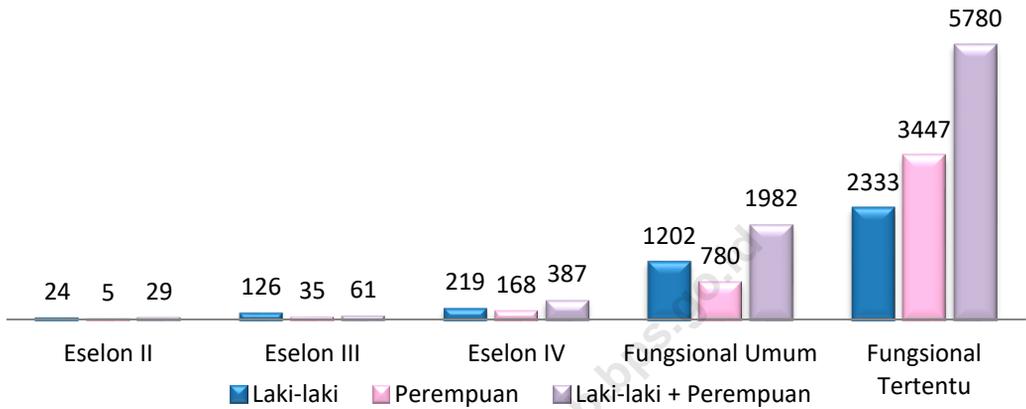


Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2023

Jabatan menjadi salah satu hal yang diinginkan bagi sebagian masyarakat. Tidak heran jika jabatan juga menentukan jenjang karir hingga pendapatan dalam sebuah pekerjaan. Jumlah ASN

perempuan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menjadi fungsional tertentu lebih banyak jika dibandingkan dengan ASN laki-laki. Sementara itu, pejabat struktural laki-laki lebih banyak dibandingkan pejabat struktural perempuan.

Gambar 3.10. Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah di Kabupaten Wonogiri, 2020-2022



Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2023

BAB

4

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

IPG Tahun 2022

91,73

Komponen :



UHH	74,53	76,41	tahun
HLS	12,52	12,43	tahun
RLS	7,94	7,05	tahun
Pengeluaran	13.474	8.739	ribu rupiah
IPM	75,23	69,01	

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan

pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus dihilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dengan demikian, perempuan akan memiliki peluang dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan mempunyai akses untuk mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya tersebut.

Dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender, maka perempuan di Indonesia akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Pertama kali IPG diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995.

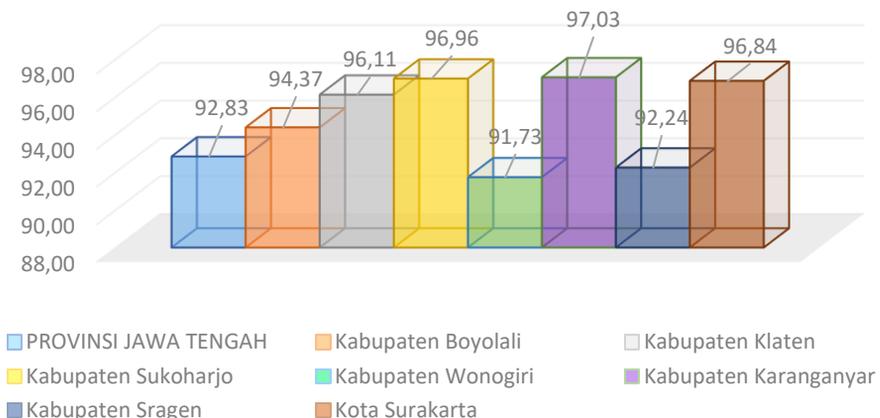
IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dari angka IPG diharapkan mampu memberikan perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Secara umum, pembangunan manusia secara kuantitatif telah digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan.

4.1 IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Di dalam lingkup Eks Karesidenan Surakarta, Kabupaten Wonogiri sudah berada posisi ketujuh dari tujuh kab/kota yaitu sebesar 91,73. Angka IPG Kabupaten Wonogiri juga lebih rendah jika dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Capaian pembangunan akan terlihat dari peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Perbandingan pembangunan terkait gender antarprovinsi di Pulau Jawa dapat dilakukan dengan capaian pembangunan dari masing-masing komponen pembentuknya.

Gambar 4.1. IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta, 2020-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

Tabel 4.1. Komponen IPG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2022

Prov/Kab/Kota	Kab Boyolali	Kab Klaten	Kab Sukoharjo	Kab Wonogiri	Kab Karanganyar	Kab Sragen	Kota Surakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UHH	LAKI-LAKI	74,32	75,18	76,09	74,53	75,89	74,10	75,66
	PEREMPUAN	76,12	76,95	77,82	76,41	77,64	75,87	77,43
	TOTAL	74,97	76,95	77,94	71,04	76,58	74,65	83,08
HLS	LAKI-LAKI	12,35	13,38	13,85	12,52	13,35	12,89	14,84
	PEREMPUAN	13,15	13,52	14,50	12,43	13,78	12,95	14,95
	TOTAL	12,62	13,40	13,90	12,51	13,70	12,91	14,89
RLS	LAKI-LAKI	8,68	9,60	10,09	7,94	9,36	8,43	11,44
	PEREMPUAN	7,51	8,62	9,17	7,05	8,36	7,27	10,56
	TOTAL	8,08	9,09	9,62	7,42	8,79	7,79	10,92
PPP	LAKI-LAKI	17.910	13.797	12.819	13.474	12.379	17.574	15.715
	PEREMPUAN	12.776	12.011	11.237	8.739	11.343	11.571	14.115
	TOTAL	13.250	12.522	11.841	9.780	11.798	13.052	15.463
IPM	LAKI-LAKI	78,63	78,88	79,64	75,23	77,76	78,63	84,16
	PEREMPUAN	74,20	75,81	77,22	69,01	75,45	72,53	81,50
	TOTAL	74,97	76,95	77,94	71,04	76,58	74,65	83,08
	IPG	94,37	96,11	96,96	91,73	97,03	92,24	96,84

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022

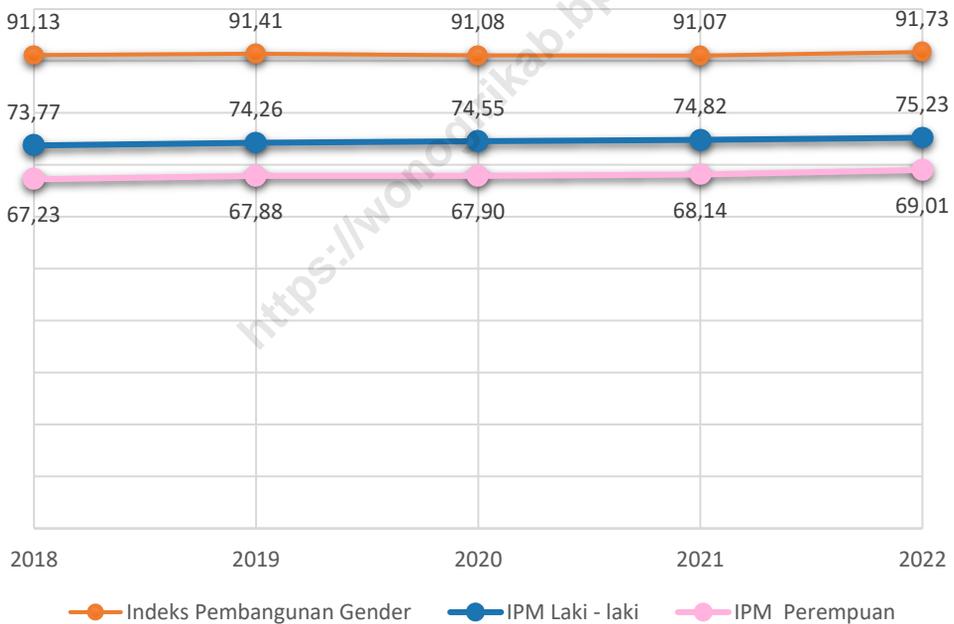
4.2 Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Wonogiri

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 tercatat 91,73 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yang tercatat 91,07. IPG ini merupakan perbandingan capaian IPM Laki-laki terhadap Capaian IPM Perempuan. Penjabarannya, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sebesar 75,23 dan perempuan sebesar 69,01. Sejak tahun 2018 hingga 2022, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), sedangkan IPM perempuan masih berstatus 'sedang' (antara 60

sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2018 hingga sekarang.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,55 persen, sementara perempuan 1,28 persen. Pada tahun 2020 ke 2021 terdapat penurunan IPG dan kembali naik lagi di tahun 2022 hingga mencapai angka IPG 91,73. Angka ini memiliki jumlah yang paling besar selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 IPM perempuan hanya tumbuh 0,53 persen sementara IPM laki-laki tumbuh hingga 0,83 persen.

Gambar 4.2. Perkembangan IPG, IPM Perempuan dan IPM Laki-laki di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022

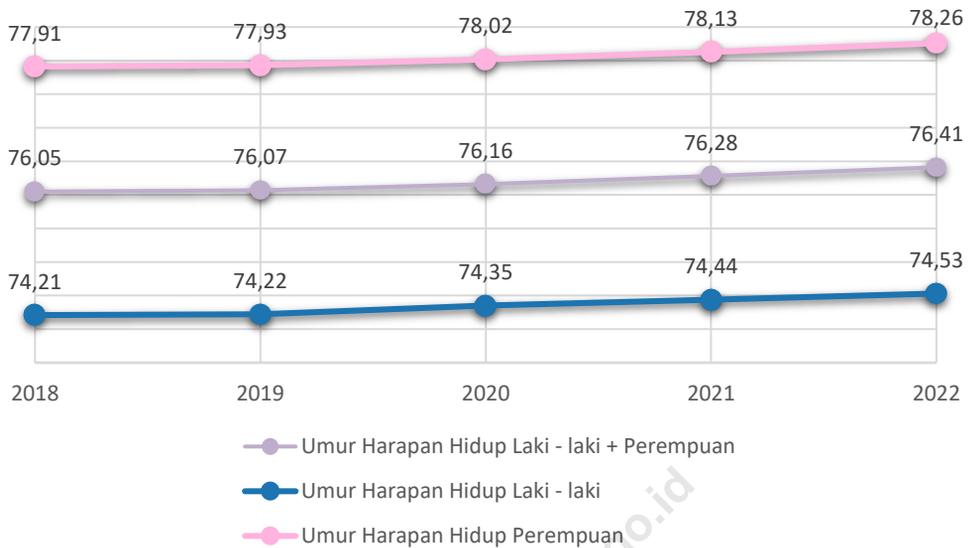


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 - 2022

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Dalam jurnal *Bio Essays*, diketahui, kekuatan perempuan ada pada tambahan kromosom X pada perempuan. Kromosom inilah yang memberikan akses ke mikroRNA, molekul-molekul yang meregulasi protein yang dibutuhkan untuk sistem imunitas. Sabra Klein, profesor mikrobiologi dan imunologi molekuler di *Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health* di US menyatakan salah satu alasan perempuan secara umum memiliki respon imun yang lebih kuat ketimbang laki-laki adalah karena faktor gen dan hormon (beritasatu.com, 2011). Hal inilah yang secara umum mempengaruhi umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Pada tahun 2022 UHH perempuan di Kabupaten Wonogiri telah mencapai 74,92 tahun, sementara laki-laki mencapai 70,99 tahun. Dari gambar berikut bisa dilihat nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya dalam kurun waktu 2018 - 2022 mengalami peningkatan yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa suatu saat nanti fenomena *female advantages* bisa jadi tidak lagi muncul di Kabupaten Wonogiri. Peningkatan nilai UHH sendiri juga lebih banyak di jenis kelamin perempuan dari tahun 2021 ke 2022 yaitu sebesar 0,13 poin untuk perempuan dibanding 0,09 poin untuk laki-laki.

Gambar 4.3. Perkembangan UHH menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022

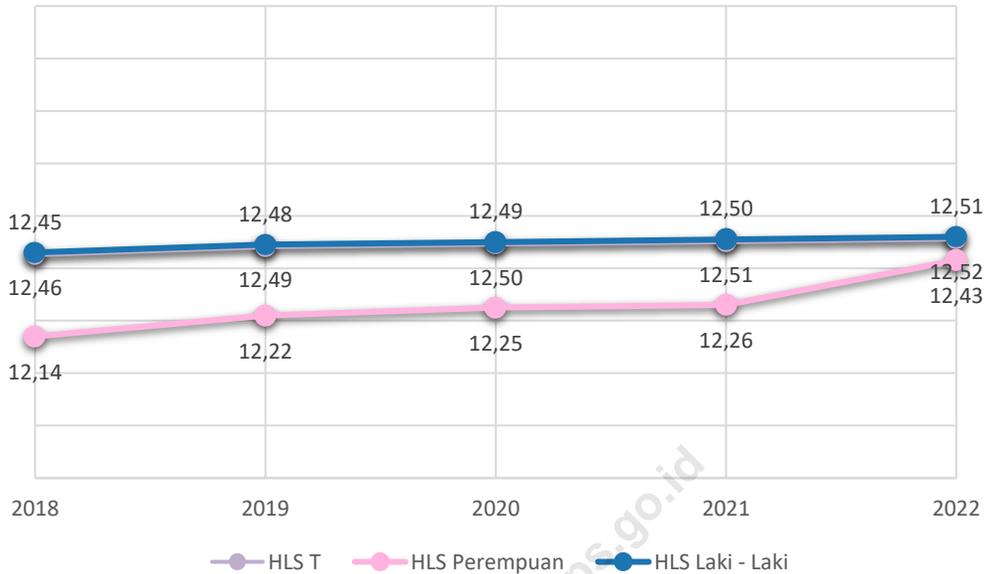


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 - 2022

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan. Todaro (2006) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan.

Salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang serta menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan. Pada tahun 2022 HLS perempuan adalah 12,43 tahun dan laki-laki sebesar 12,52 persen. Ini berarti anak-anak laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Wonogiri yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga SMA/ sederajat. Dengan nilai pencapaian tersebut, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan telah dapat diwujudkan secara merata.

Gambar 4.4. Perkembangan HLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 – 2022

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2018 - 2022 Persentase rata – rata lama sekolah laki–laki lebih besar dibandingkan perempuan. Pada tahun 2022, rata-rata pendidikan yang dijalani oleh laki- laki adalah sekitar 7,42 tahun, sedangkan perempuan 7,055 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Wonogiri berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas VII

Gambar 4.5. Perkembangan RLS menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 – 2022

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

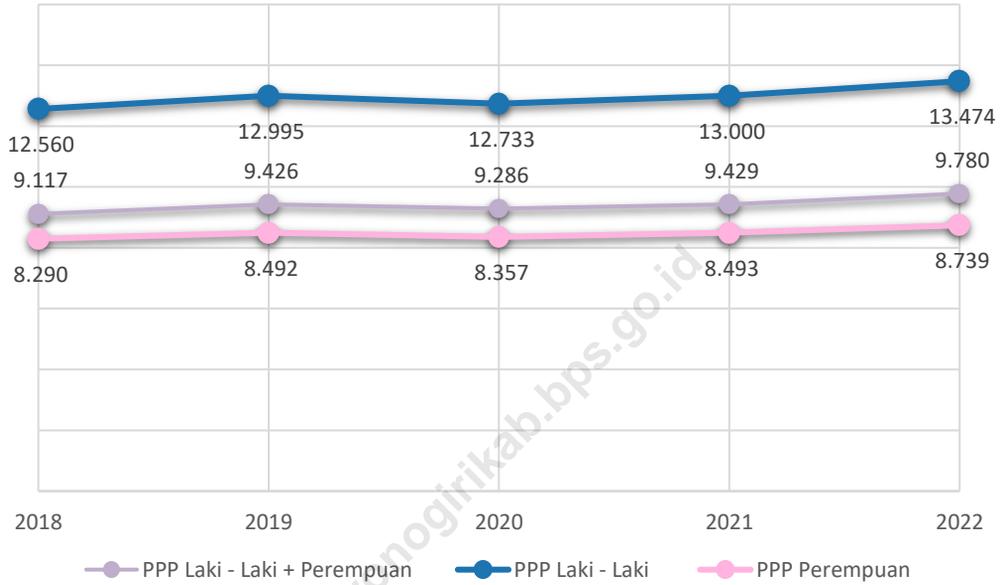
Dari gambar di atas tampak bahwa meskipun pengeluaran per kapita pada perempuan dan laki-laki terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun perekonomian di Kabupaten Wonogiri masih didominasi oleh laki-laki.

Selama periode 2018 hingga 2022, nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki - laki adalah sebesar 13,474 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan adalah sebesar 8,739 juta rupiah. Rasio Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2022 sebesar 0,65.

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, perdagangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih

didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Gambar 4.6. Perkembangan Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 - 2022

BAB

5

CAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER DI KABUPATEN WONOGIRI

IDG Tahun 2022

72,97

Komponen :



84,00



16,00

persen

Persentase Keterlibatan di Parlemen

Persentase Tenaga Manager Profesional, Administrasi, Teknisi

47,61

52,39

persen

Sumbangan Dalam Pendapatan Kerja

61,02

38,98

persen

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

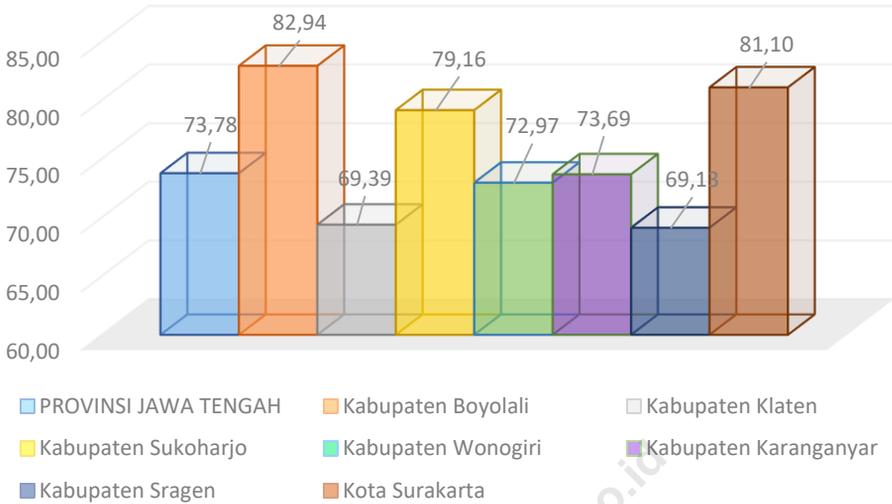
Sistem patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mencakup mulai dari ranah personal (kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam ruang privat dengan pelaku orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan) hingga lainnya. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi dalam berbagai budaya yang berbeda. Upaya pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender menjadi langkah penting proses modernisasi masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang disusun oleh UNDP.

5.1 IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta

Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebesar 72,97, dalam lingkup eks karesidenan Surakarta, menempati posisi ke lima dari tujuh kabupaten/kota. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Namun, IDG Kabupaten Wonogiri yang tercatat lebih rendah dibanding IDG Jawa Tengah. IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 1,42 poin atau meningkat sebesar 1,98 persen.

Gambar 5.1. IDG Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2022

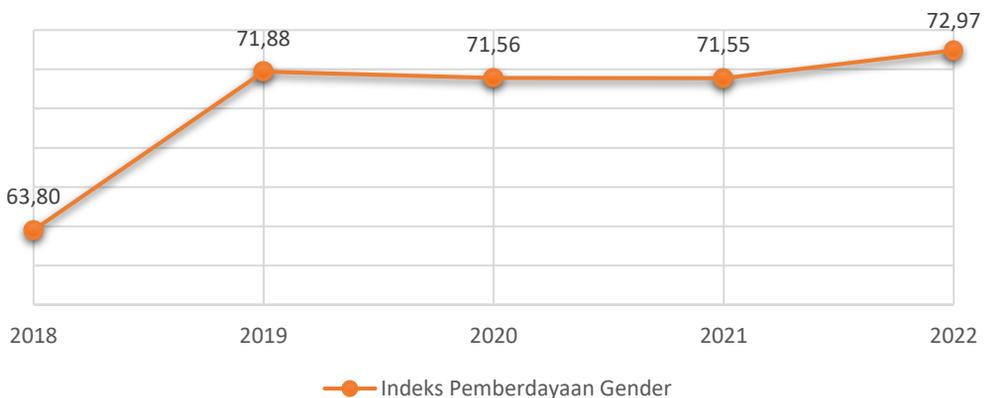


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 - 2022

5.2 Perkembangan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Wonogiri

Pemberdayaan gender di Kabupaten Wonogiri pada periode 2018 – 2022 cenderung mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2019 – 2021 mulai mengalami penurunan. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Wonogiri berada pada level 71,88, menurun 1,07 poin atau turun 1,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019 menurun 0,32 poin atau turun 0,45 persen, tahun 2021 menurun 0,01 poin atau turun 0,01 persen. Pada tahun 2022 meningkat 1,98 persen dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 5.2. IDG Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 - 2022

Kenaikan IDG tahun 2022 terutama terjadi karena kenaikan komponen persentase persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional meningkat 4,08 poin dari 48,31 persen pada tahun 2021, menjadi 52,39 persen pada tahun 2022. Demikian juga persentase perempuan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja meningkat 0,35 poin dari 38,63 persen pada tahun 2021 menjadi 38,98 persen pada tahun 2022. IDG pada periode tahun 2021-2022 terjadi peningkatan. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan keadaan pemberdayaan gender di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022.

Gambar 5.3. Komponen IDG Kabupaten Wonogiri, 2018-2022

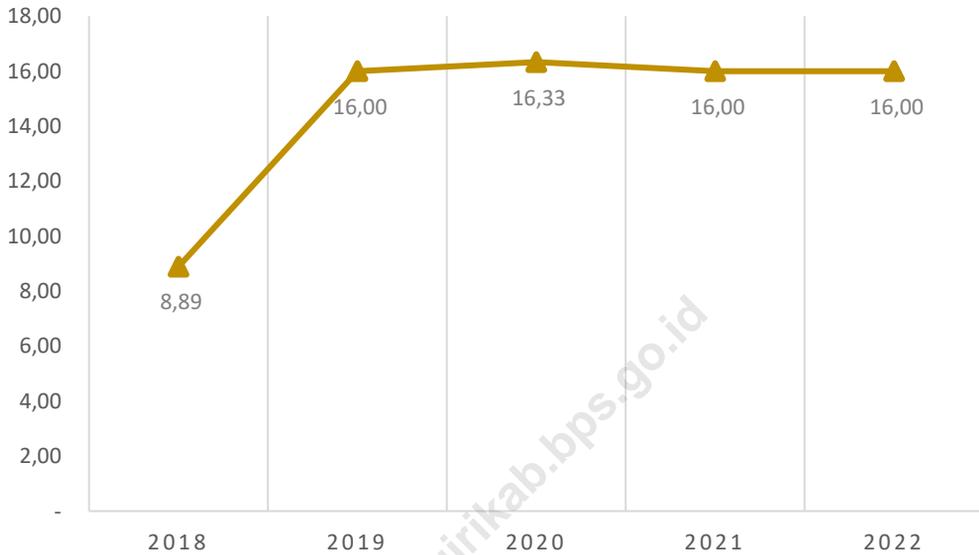


Sumber : BPS

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang- Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30 persen anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Wonogiri pada

periode 2018-2019 meningkat dari 8,89 persen menjadi 16,00 persen, kemudian cenderung sama menurun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 sebesar 16,00 persen.

Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022

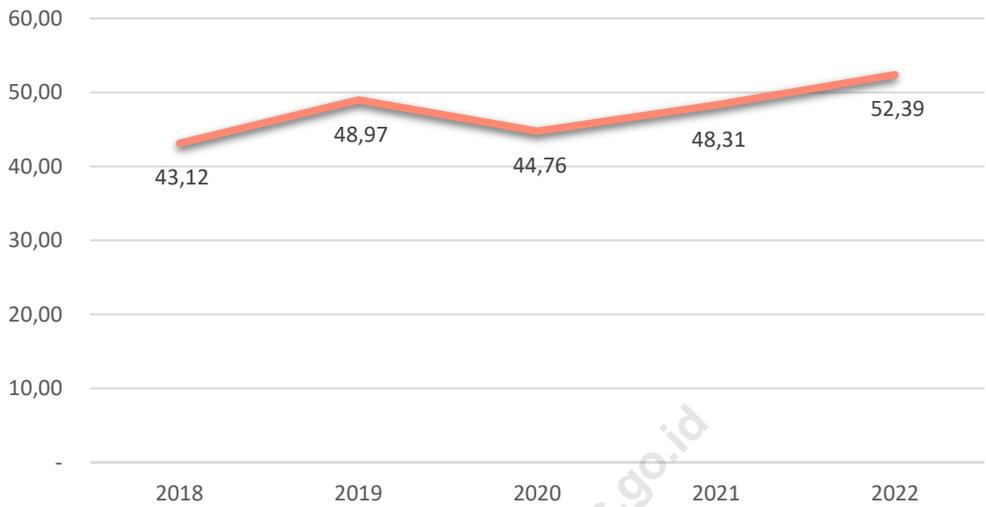


Sumber : BPS

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia (BPS, 2018).

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen yang selalu meningkat ini berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah. Tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase perempuan sebagai tenaga profesional seperti manajer, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan fluktuasi, yaitu pada tahun 2018 tercatat hanya sebesar 43,12 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 52,3 persen, namun sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

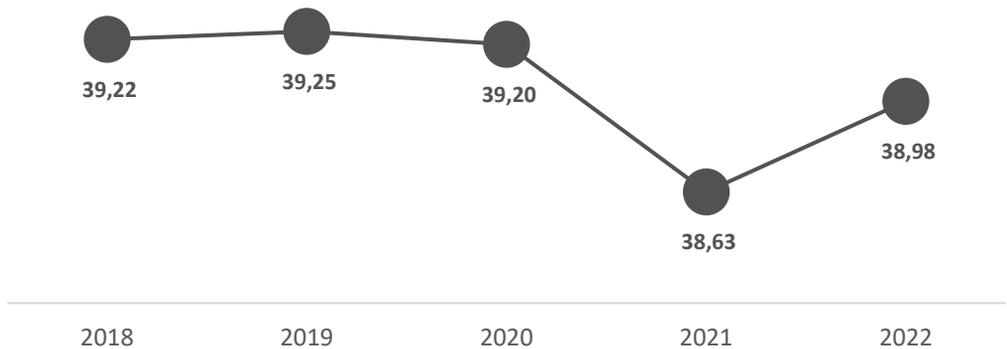
Gambar 5.5. Perkembangan Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : BPS

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Wonogiri cenderung berfluktuasi, yaitu tahun 2018 sebesar 39,22 persen terus menurun hingga menjadi sebesar 38,98 persen pada tahun 2020, kemudian terlihat berfluktuasi hingga tahun 2022. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh, namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja yang cukup lambat ini memiliki tren meningkat dan lima tahun ke depan diharapkan akan semakin meningkat.

Gambar 5.6. Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022



Sumber : BPS

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB

KESIMPULAN

6

2022



IPM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

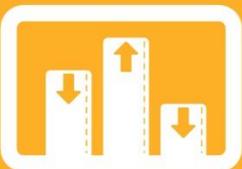
71,04



IPM

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

91,73



IDG

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

72,97

Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 tercatat 91,73 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yang tercatat 91,07. IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sebesar 75,23 dan perempuan sebesar 74,82. Pada tahun 2022, IPM laki-laki di Kabupaten Wonogiri sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), sedangkan IPM perempuan masih berstatus 'sedang' (antara 60 sampai dengan 70). Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2012 hingga sekarang. Posisi IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebesar 72,97 meningkat dibanding IPG Kabupaten Wonogiri tahun 2021 yang tercatat 71,55.

DAFTAR PUSTAKA

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2023). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2023. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2022). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2022. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2021). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2021. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2020). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2020. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2019). Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2019. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Agustus 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Jawa Tengah Dalam Angka 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2022. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2021. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2020. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2019. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wonogiri 2018. Wonogiri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		Laki – laki		Perempuan		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	76,08	76,54	70,36	71,05	72,16	72,79
3301	Cilacap	75,46	76,05	65,65	66,18	70,42	70,99
3302	Banyumas	76,76	77,20	67,96	68,82	72,44	73,17
3303	Purbalingga	72,84	73,22	67,80	68,25	69,15	69,54
3304	Banjarnegara	69,63	70,47	66,37	67,08	67,86	68,61
3305	Kebumen	73,63	74,28	68,52	69,27	70,05	70,79
3306	Purworejo	75,31	75,81	71,79	72,47	72,98	73,60
3307	Wonosobo	71,84	72,37	66,65	67,05	68,43	68,89
3308	Magelang	74,69	75,23	68,63	69,37	70,12	70,85
3309	Boyolali	78,15	78,63	73,63	74,20	74,40	74,97
3310	Klaten	78,09	78,88	74,97	75,81	76,12	76,95
3311	Sukoharjo	79,05	79,64	76,30	77,22	77,13	77,94
3312	Wonogiri	74,82	75,23	68,14	69,01	70,49	71,04
3313	Karanganyar	77,42	77,76	74,81	75,45	75,99	76,58
3314	Sragen	78,28	78,63	71,77	72,53	74,08	74,65
3315	Grobogan	76,85	77,37	66,01	66,68	70,41	70,97
3316	Blora	74,67	75,15	63,16	63,82	69,37	69,95
3317	Rembang	75,24	75,66	65,70	66,28	70,43	71,00
3318	Pati	76,68	77,45	70,71	71,58	72,28	73,14
3319	Kudus	79,27	79,62	73,69	74,49	75,16	75,89
3320	Jepara	76,30	77,07	69,65	70,47	72,36	73,15
3321	Demak	77,05	77,84	70,24	71,07	72,57	73,36
3322	Semarang	76,00	76,43	73,42	73,83	74,24	74,67
3323	Temanggung	72,02	72,78	68,95	69,86	69,88	70,77
3324	Kendal	76,02	76,38	70,93	71,64	72,50	73,19
3325	Batang	72,88	73,43	66,95	67,47	68,92	69,45
3326	Pekalongan	73,69	74,32	68,21	68,91	70,11	70,81
3327	Pemalang	71,64	72,24	61,96	62,65	66,56	67,19
3328	Tegal	74,18	74,70	64,93	65,90	68,79	69,53
3329	Brebes	70,94	71,50	61,47	62,34	66,32	67,03
3371	Kota Magelang	82,03	82,72	78,37	79,34	79,43	80,39
3372	Kota Surakarta	83,65	84,16	81,05	81,50	82,62	83,08
3373	Kota Salatiga	86,58	87,32	82,57	83,34	83,60	84,35
3374	Kota Semarang	85,63	86,15	81,92	82,64	83,55	84,08
3375	Kota Pekalongan	78,30	78,90	74,71	75,21	75,40	75,90
3376	Kota Tegal	79,35	79,93	74,00	74,65	75,52	76,15

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rangking IPG, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Rangking IPG	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	92,48	92,83		
3301	Cilacap	87,00	87,02	31	32
3302	Banyumas	88,54	89,15	28	28
3303	Purbalingga	93,08	93,21	16	18
3304	Banjarnegara	95,32	95,19	12	12
3305	Kebumen	93,06	93,26	17	17
3306	Purworejo	95,33	95,59	11	9
3307	Wonosobo	92,78	92,65	19	20
3308	Magelang	91,89	92,21	22	23
3309	Boyolali	94,22	94,37	13	13
3310	Klaten	96,00	96,11	5	5
3311	Sukoharjo	96,52	96,96	4	2
3312	Wonogiri	91,07	91,73	27	25
3313	Karanganyar	96,63	97,03	2	1
3314	Sragen	91,68	92,24	24	22
3315	Grobogan	85,89	86,18	34	34
3316	Blora	84,59	84,92	35	35
3317	Rembang	87,32	87,60	30	30
3318	Pati	92,21	92,42	21	21
3319	Kudus	92,96	93,56	18	15
3320	Jepara	91,28	91,44	25	26
3321	Demak	91,16	91,30	26	27
3322	Semarang	96,61	96,60	3	4
3323	Temanggung	95,74	95,99	6	6
3324	Kendal	93,30	93,79	14	14
3325	Batang	91,86	91,88	23	24
3326	Pekalongan	92,56	92,72	20	19
3327	Pemalang	86,49	86,72	33	33
3328	Tegal	87,53	88,22	29	29
3329	Brebes	86,65	87,19	32	31
3371	Kota Magelang	95,54	95,91	8	8
3372	Kota Surakarta	96,89	96,84	1	3
3373	Kota Salatiga	95,37	95,44	10	10
3374	Kota Semarang	95,67	95,93	7	7
3375	Kota Pekalongan	95,42	95,32	9	11
3376	Kota Tegal	93,26	93,39	15	16

Lampiran 3. Usia Harapan Hidup Saat lahir (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)					
		Laki – laki		Perempuan		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	72,61	72,71	76,42	76,53	74,47	74,57
3301	Cilacap	72,05	72,25	75,75	75,94	73,90	74,07
3302	Banyumas	71,93	72,06	75,71	75,86	73,80	73,88
3303	Purbalingga	71,30	71,38	75,09	75,18	73,21	73,28
3304	Banjarnegara	72,40	72,49	76,11	76,22	74,28	74,37
3305	Kebumen	71,65	71,80	75,41	75,57	73,55	73,70
3306	Purworejo	73,00	73,16	76,69	76,87	74,87	75,03
3307	Wonosobo	70,01	70,12	73,84	73,95	71,94	72,05
3308	Magelang	71,99	72,13	75,73	75,90	73,88	74,03
3309	Boyolali	74,24	74,32	77,96	78,07	76,03	76,12
3310	Klaten	75,10	75,18	78,80	78,91	76,86	76,95
3311	Sukoharjo	75,99	76,09	79,72	79,83	77,73	77,82
3312	Wonogiri	74,44	74,53	78,13	78,26	76,28	76,41
3313	Karanganyar	75,81	75,89	79,43	79,54	77,55	77,64
3314	Sragen	74,00	74,10	77,64	77,73	75,79	75,87
3315	Grobogan	73,00	73,10	76,66	76,77	74,84	74,93
3316	Blora	72,66	72,78	76,35	76,48	74,51	74,60
3317	Rembang	72,73	72,79	76,43	76,51	74,61	74,68
3318	Pati	74,28	74,34	78,10	78,18	76,27	76,32
3319	Kudus	74,87	74,94	78,66	78,75	76,68	76,76
3320	Jepara	74,11	74,18	77,89	77,96	75,91	75,97
3321	Demak	73,64	73,69	77,37	77,45	75,46	75,52
3322	Semarang	74,00	74,08	77,69	77,77	75,79	75,86
3323	Temanggung	73,81	73,87	77,57	77,64	75,64	75,70
3324	Kendal	72,64	72,70	76,34	76,41	74,48	74,53
3325	Batang	72,89	72,93	76,65	76,70	74,74	74,79
3326	Pekalongan	71,84	71,89	75,60	75,67	73,74	73,80
3327	Pemalang	71,65	71,79	75,46	75,66	73,53	73,65
3328	Tegal	69,83	69,98	73,61	73,74	71,72	71,85
3329	Brebes	67,64	67,83	71,44	71,65	69,54	69,74
3371	Kota Magelang	75,11	75,19	78,82	78,92	76,93	77,02
3372	Kota Surakarta	75,57	75,66	79,23	79,35	77,32	77,43
3373	Kota Salatiga	75,50	75,66	79,44	79,63	77,55	77,72
3374	Kota Semarang	75,79	75,94	79,43	79,61	77,51	77,69
3375	Kota Pekalongan	72,54	72,59	76,26	76,34	74,44	74,51
3376	Kota Tegal	72,66	72,72	76,46	76,56	74,54	74,64

Lampiran 4. Harapan Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (tahun)					
		Laki – laki		Perempuan		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	12,71	12,72	12,93	12,99	12,77	12,81
3301	Cilacap	13,07	13,08	12,58	12,65	12,63	12,66
3302	Banyumas	13,02	13,05	13,04	13,31	13,03	13,21
3303	Purbalingga	12,21	12,23	11,85	11,86	12,00	12,01
3304	Banjarnegara	11,62	11,78	11,78	12,01	11,63	11,81
3305	Kebumen	13,34	13,35	13,54	13,55	13,35	13,36
3306	Purworejo	13,65	13,66	13,34	13,50	13,51	13,52
3307	Wonosobo	11,73	11,77	11,79	11,81	11,76	11,78
3308	Magelang	12,54	12,58	12,96	12,98	12,55	12,58
3309	Boyolali	12,19	12,35	13,13	13,15	12,57	12,62
3310	Klaten	13,37	13,38	13,51	13,52	13,39	13,40
3311	Sukoharjo	13,83	13,85	14,23	14,50	13,84	13,90
3312	Wonogiri	12,51	12,52	12,26	12,43	12,50	12,51
3313	Karanganyar	13,34	13,35	13,77	13,78	13,69	13,70
3314	Sragen	12,86	12,89	12,83	12,95	12,84	12,91
3315	Grobogan	13,77	13,78	12,44	12,45	12,44	12,45
3316	Blora	12,94	12,96	12,35	12,44	12,35	12,44
3317	Rembang	12,15	12,16	12,11	12,13	12,12	12,13
3318	Pati	13,06	13,07	12,93	12,94	12,94	12,95
3319	Kudus	13,20	13,21	13,28	13,39	13,24	13,25
3320	Jepara	12,72	12,73	13,08	13,09	12,76	12,77
3321	Demak	13,22	13,31	13,52	13,53	13,32	13,33
3322	Semarang	13,13	13,15	12,98	13,04	12,98	13,04
3323	Temanggung	12,12	12,41	12,59	12,80	12,32	12,55
3324	Kendal	12,82	12,83	13,18	13,21	12,96	12,97
3325	Batang	11,95	11,97	12,35	12,36	12,13	12,14
3326	Pekalongan	12,10	12,11	12,99	13,00	12,42	12,43
3327	Pemalang	12,20	12,22	11,94	11,95	11,96	11,98
3328	Tegal	13,24	13,26	12,59	12,82	12,89	12,91
3329	Brebes	12,15	12,17	12,04	12,15	12,05	12,15
3371	Kota Magelang	14,44	14,59	14,00	14,23	14,15	14,31
3372	Kota Surakarta	14,78	14,84	14,94	14,95	14,88	14,89
3373	Kota Salatiga	15,41	15,42	15,43	15,44	15,42	15,43
3374	Kota Semarang	15,73	15,74	15,24	15,53	15,53	15,54
3375	Kota Pekalongan	12,71	12,72	13,07	13,11	12,85	12,86
3376	Kota Tegal	13,06	13,07	13,24	13,26	13,07	13,08

Lampiran 5. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)					
		Laki – laki		Perempuan		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	8,17	8,31	7,34	7,55	7,75	7,93
3301	Cilacap	7,47	7,66	6,76	6,77	7,09	7,18
3302	Banyumas	7,98	8,03	7,35	7,53	7,63	7,78
3303	Purbalingga	7,49	7,57	6,95	7,09	7,25	7,33
3304	Banjarnegara	6,93	7,12	6,58	6,59	6,75	6,84
3305	Kebumen	7,99	8,22	7,11	7,42	7,55	7,85
3306	Purworejo	8,86	8,87	7,89	8,00	8,21	8,32
3307	Wonosobo	7,03	7,13	6,62	6,63	6,82	6,88
3308	Magelang	8,32	8,34	7,30	7,32	7,79	7,81
3309	Boyolali	8,65	8,68	7,26	7,51	7,85	8,08
3310	Klaten	9,35	9,60	8,33	8,62	8,81	9,09
3311	Sukoharjo	9,97	10,09	8,88	9,17	9,35	9,62
3312	Wonogiri	7,93	7,94	6,81	7,05	7,34	7,42
3313	Karanganyar	9,34	9,36	8,07	8,36	8,57	8,79
3314	Sragen	8,42	8,43	6,97	7,27	7,66	7,79
3315	Grobogan	7,64	7,78	6,51	6,76	7,11	7,26
3316	Blora	7,41	7,43	6,58	6,60	6,99	7,01
3317	Rembang	7,86	7,88	6,82	6,94	7,30	7,41
3318	Pati	8,05	8,31	7,13	7,49	7,48	7,79
3319	Kudus	9,39	9,40	8,27	8,59	8,76	9,06
3320	Jepara	8,18	8,47	7,37	7,69	7,79	8,09
3321	Demak	8,31	8,51	7,42	7,69	7,86	8,10
3322	Semarang	8,46	8,48	7,75	7,76	8,03	8,05
3323	Temanggung	7,54	7,56	7,02	7,28	7,25	7,41
3324	Kendal	8,11	8,12	6,89	7,16	7,46	7,71
3325	Batang	7,44	7,55	6,54	6,55	6,88	6,90
3326	Pekalongan	7,53	7,78	6,85	7,14	7,17	7,46
3327	Pemalang	6,96	7,01	6,10	6,15	6,45	6,50
3328	Tegal	7,61	7,71	6,48	6,79	6,99	7,25
3329	Brebes	6,78	6,88	5,55	5,83	6,22	6,35
3371	Kota Magelang	11,32	11,42	10,42	10,75	10,62	10,94
3372	Kota Surakarta	11,42	11,44	10,54	10,56	10,90	10,92
3373	Kota Salatiga	11,19	11,47	10,32	10,64	10,66	10,95
3374	Kota Semarang	11,51	11,53	10,44	10,46	10,78	10,80
3375	Kota Pekalongan	9,28	9,45	8,97	8,98	9,18	9,20
3376	Kota Tegal	9,06	9,31	8,28	8,57	8,73	9,00

Lampiran 6. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
Menurut Jenis Kelamin, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)					
		Laki – laki		Perempuan		Total	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3300	JAWA TENGAH	15 253	15 606	9 805	10 098	11 034	11 377
3301	Cilacap	15 560	15 956	7 200	7 442	10 534	10 904
3302	Banyumas	16 840	17 352	7 957	8 173	11 546	11 905
3303	Purbalingga	13 491	13 810	9 538	9 741	10 032	10 277
3304	Banjarnegara	10 692	11 081	8 415	8 735	9 407	9 776
3305	Kebumen	11 811	12 153	8 304	8 528	9 028	9 282
3306	Purworejo	11 414	11 865	9 972	10 256	10 275	10 671
3307	Wonosobo	14 705	15 192	9 440	9 754	10 760	11 108
3308	Magelang	13 554	14 154	8 575	9 084	9 440	10 011
3309	Boyolali	17 489	17 910	12 568	12 776	13 031	13 250
3310	Klaten	13 229	13 797	11 539	12 011	12 017	12 522
3311	Sukoharjo	12 360	12 819	10 982	11 237	11 428	11 841
3312	Wonogiri	13 000	13 474	8 493	8 739	9 429	9 780
3313	Karanganyar	12 064	12 379	11 116	11 343	11 509	11 798
3314	Sragen	17 084	17 574	11 360	11 571	12 679	13 052
3315	Grobogan	15 450	15 914	7 504	7 704	10 294	10 610
3316	Blora	14 228	14 804	5 910	6 163	9 669	10 067
3317	Rembang	15 543	16 150	7 326	7 576	10 519	10 937
3318	Pati	14 638	15 243	9 718	10 046	10 506	10 948
3319	Kudus	15 257	15 725	10 578	10 823	11 272	11 609
3320	Jepara	14 489	15 018	8 486	8 779	10 536	10 913
3321	Demak	14 840	15 481	8 705	9 077	10 248	10 698
3322	Semarang	12 976	13 435	11 843	12 211	12 070	12 448
3323	Temanggung	11 098	11 538	8 819	9 081	9 408	9 773
3324	Kendal	15 078	15 574	10 740	11 060	11 608	11 999
3325	Batang	13 076	13 581	8 234	8 611	9 524	9 972
3326	Pekalongan	14 517	14 922	8 715	8 954	10 409	10 707
3327	Pemalang	12 642	13 254	6 009	6 295	8 573	8 994
3328	Tegal	14 548	15 018	7 550	7 749	9 700	10 020
3329	Brebes	14 812	15 330	7 038	7 238	10 152	10514
3371	Kota Magelang	13 806	14 341	11 897	12 254	12 349	12 816
3372	Kota Surakarta	15 139	15 715	13 626	14 115	14 911	15 463
3373	Kota Salatiga	19 666	20 313	15 329	15 764	15 843	16 351
3374	Kota Semarang	16 436	17 115	14 442	14 908	15 425	16 047
3375	Kota Pekalongan	16 589	17 200	12 180	12 688	12 598	13 158
3376	Kota Tegal	18 275	18 695	12 043	12 305	13 143	13 455

Lampiran 7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Rangking IDG, 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Rangking IDG	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	71,64	73,78		
3301	Cilacap	70,67	70,90	17	18
3302	Banyumas	70,10	72,77	19	15
3303	Purbalingga	70,99	70,09	16	19
3304	Banjarnegara	73,79	73,80	10	11
3305	Kebumen	66,86	66,87	23	26
3306	Purworejo	70,09	71,13	20	17
3307	Wonosobo	48,68	49,19	35	35
3308	Magelang	69,64	69,66	21	20
3309	Boyolali	82,23	82,94	2	2
3310	Klaten	71,88	69,39	14	21
3311	Sukoharjo	77,69	79,16	8	7
3312	Wonogiri	71,55	72,97	15	14
3313	Karanganyar	73,38	73,69	12	13
3314	Sragen	67,14	69,13	22	22
3315	Grobogan	58,03	58,98	32	33
3316	Blora	64,36	62,64	29	30
3317	Rembang	65,88	66,96	26	25
3318	Pati	66,65	68,65	25	23
3319	Kudus	65,54	65,69	27	27
3320	Jepara	56,66	57,23	34	34
3321	Demak	66,83	67,82	24	24
3322	Semarang	78,35	75,78	7	9
3323	Temanggung	84,56	84,80	1	1
3324	Kendal	76,95	77,05	9	8
3325	Batang	64,43	64,44	28	29
3326	Pekalongan	70,54	71,76	18	16
3327	Pemalang	81,27	81,57	3	3
3328	Tegal	72,32	73,76	13	12
3329	Brebes	61,89	61,89	31	31
3371	Kota Magelang	78,65	80,13	6	5
3372	Kota Surakarta	79,32	81,10	4	4
3373	Kota Salatiga	79,08	79,29	5	6
3374	Kota Semarang	73,64	73,93	11	10
3375	Kota Pekalongan	57,87	61,37	33	32
3376	Kota Tegal	63,34	64,80	30	28

Lampiran 8. Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin (Persen)			
		2021		2022	
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	81,67	18,33	80,00	20,00
3301	Cilacap	74,00	26,00	74,00	26,00
3302	Banyumas	80,00	20,00	78,00	22,00
3303	Purbalingga	77,78	22,22	77,78	22,22
3304	Banjarnegara	74,00	26,00	74,00	26,00
3305	Kebumen	78,00	22,00	78,00	22,00
3306	Purworejo	82,22	17,78	82,22	17,78
3307	Wonosobo	95,56	4,44	95,56	4,44
3308	Magelang	86,00	14,00	86,00	14,00
3309	Boyolali	68,89	31,11	68,89	31,11
3310	Klaten	82,00	18,00	86,00	14,00
3311	Sukoharjo	77,78	22,22	77,27	22,73
3312	Wonogiri	84,00	16,00	84,00	16,00
3313	Karanganyar	81,82	18,18	81,82	18,18
3314	Sragen	86,67	13,33	84,44	15,56
3315	Grobogan	88,00	12,00	88,00	12,00
3316	Blora	88,89	11,11	91,11	8,89
3317	Rembang	86,67	13,33	86,67	13,33
3318	Pati	84,00	16,00	84,00	16,00
3319	Kudus	91,11	8,89	91,11	8,89
3320	Jepara	88,00	12,00	88,00	12,00
3321	Demak	88,00	12,00	88,00	12,00
3322	Semarang	78,00	22,00	82,00	18,00
3323	Temanggung	66,67	33,33	66,67	33,33
3324	Kendal	75,56	24,44	75,56	24,44
3325	Batang	84,09	15,91	84,44	15,56
3326	Pekalongan	73,33	26,67	73,33	26,67
3327	Pemalang	68,00	32,00	68,00	32,00
3328	Tegal	76,00	24,00	76,00	24,00
3329	Brebes	84,00	16,00	84,00	16,00
3371	Kota Magelang	76,00	24,00	76,00	24,00
3372	Kota Surakarta	77,78	22,22	75,56	24,44
3373	Kota Salatiga	76,00	24,00	76,00	24,00
3374	Kota Semarang	81,25	18,75	82,00	18,00
3375	Kota Pekalongan	91,43	8,57	88,57	11,43
3376	Kota Tegal	86,67	13,33	86,67	13,33

Lampiran 9. Keterlibatan Sebagai Tenaga Profesional menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin (Persen)			
		2021		2022	
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	49,33	50,67	49,28	50,72
3301	Cilacap	54,31	45,69	44,43	55,57
3302	Banyumas	50,68	49,32	50,51	49,49
3303	Purbalingga	49,48	50,52	39,79	60,21
3304	Banjarnegara	50,08	49,92	52,54	47,46
3305	Kebumen	43,91	56,09	42,99	57,01
3306	Purworejo	46,56	53,44	53,19	46,81
3307	Wonosobo	52,33	47,67	50,11	49,89
3308	Magelang	44,37	55,63	42,50	57,50
3309	Boyolali	51,42	48,58	45,47	54,53
3310	Klaten	41,54	58,46	44,95	55,05
3311	Sukoharjo	41,88	58,12	47,52	52,48
3312	Wonogiri	51,69	48,31	47,61	52,39
3313	Karanganyar	48,87	51,13	51,80	48,20
3314	Sragen	46,06	53,94	42,73	57,27
3315	Grobogan	49,82	50,18	54,03	45,97
3316	Blora	51,52	48,48	50,76	49,24
3317	Rembang	48,61	51,39	53,41	46,59
3318	Pati	55,06	44,94	47,23	52,77
3319	Kudus	50,33	49,67	52,74	47,26
3320	Jepara	49,43	50,57	46,93	53,07
3321	Demak	51,15	48,85	54,34	45,66
3322	Semarang	53,36	46,64	53,41	46,59
3323	Temanggung	51,86	48,14	52,12	47,88
3324	Kendal	44,93	55,07	47,71	52,29
3325	Batang	54,24	45,76	51,32	48,68
3326	Pekalongan	50,71	49,29	51,97	48,03
3327	Pemalang	50,60	49,40	56,91	43,09
3328	Tegal	54,36	45,64	49,13	50,87
3329	Brebes	50,67	49,33	54,73	45,27
3371	Kota Magelang	40,11	59,89	53,19	46,81
3372	Kota Surakarta	50,22	49,78	42,83	57,17
3373	Kota Salatiga	51,39	48,61	46,78	53,22
3374	Kota Semarang	48,70	51,30	50,22	49,78
3375	Kota Pekalongan	49,10	50,90	45,35	54,65
3376	Kota Tegal	41,39	58,61	54,47	45,53

Lampiran 10. Sumbangan Pendapatan menurut Jenis Kelamin (Persen), 2021-2022

Kab/ Kota	Prov/Kab/Kota	Sumbangan Pendapatan menurut Jenis Kelamin (Persen)			
		2021		2022	
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3300	JAWA TENGAH	65,40	34,60	65,41	34,59
3301	Cilacap	73,17	26,83	73,52	26,48
3302	Banyumas	69,33	30,67	68,60	31,40
3303	Purbalingga	69,39	30,61	70,24	29,76
3304	Banjarnegara	70,60	29,40	71,67	28,33
3305	Kebumen	74,17	25,83	74,80	25,20
3306	Purworejo	65,67	34,33	65,54	34,46
3307	Wonosobo	75,69	24,31	75,68	24,32
3308	Magelang	62,18	37,82	62,75	37,25
3309	Boyolali	59,03	40,97	58,30	41,70
3310	Klaten	62,22	37,78	62,55	37,45
3311	Sukoharjo	58,58	41,42	59,02	40,98
3312	Wonogiri	61,37	38,63	61,02	38,98
3313	Karanganyar	61,59	38,41	61,88	38,12
3314	Sragen	62,85	37,15	63,63	36,37
3315	Grobogan	74,15	25,85	73,94	26,06
3316	Blora	65,79	34,21	66,33	33,67
3317	Rembang	68,08	31,92	67,50	32,50
3318	Pati	68,36	31,64	68,32	31,68
3319	Kudus	58,55	41,45	59,29	40,71
3320	Jepara	75,92	24,08	75,89	24,11
3321	Demak	62,17	37,83	61,65	38,35
3322	Semarang	53,81	46,19	53,80	46,20
3323	Temanggung	58,81	41,19	59,10	40,90
3324	Kendal	64,65	35,35	65,25	34,75
3325	Batang	71,08	28,92	72,04	27,96
3326	Pekalongan	74,21	25,79	74,16	25,84
3327	Pemalang	64,41	35,59	65,22	34,78
3328	Tegal	70,91	29,09	70,75	29,25
3329	Brebes	74,65	25,35	75,08	24,92
3371	Kota Magelang	57,85	42,15	58,16	41,84
3372	Kota Surakarta	56,43	43,57	56,15	43,85
3373	Kota Salatiga	58,92	41,08	59,60	40,40
3374	Kota Semarang	62,54	37,46	61,95	38,05
3375	Kota Pekalongan	71,79	28,21	71,96	28,04
3376	Kota Tegal	69,81	30,19	70,14	29,86

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

Jalan Pelem II No. 8 Wonogiri 57612

Telp (0273) 321055, Faks (0273) 321055

Homepage: <http://wonogirikab.bps.go.id> E-mail: bps3312@bps.go.id